

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi secara harfiah diartikan sebagai sarana yang akan mendorong kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pertumbuhan lapangan kerja dan penurunan pengangguran. Diketahui bahwa pengangguran yang tinggi adalah fenomena yang dapat memperlambat laju pembangunan dan merusak keberhasilan sosial dan ekonomi masyarakat secara umum (Susanto & Pratama, 2021). Dalam konteks itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti melalui pendidikan, dianggap strategis karena secara langsung terkait dengan produktivitas, peluang kerja, dan faktor kesejahteraan lainnya seperti kemiskinan (Adam *et al.*, 2022). Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi diterjemahkan menjadi penciptaan lapangan kerja dengan mengembangkan kebijakan pasar tenaga kerja yang baik dan pembangunan manusia (Susanto & Pratama, 2021).

Pada praktiknya, daerah yang masih menghadapi persoalan kesejahteraan membutuhkan perencanaan pembangunan yang lebih fokus agar peningkatan partisipasi ekonomi penduduk tidak justru memperluas pengangguran (Susanto & Pratama, 2021). Data empiris yang berbeda menunjukkan bahwa faktor pengangguran bervariasi di setiap daerah dan oleh karena itu, pengembangan kebijakan harus dilakukan dengan data lokal dan mempertimbangkan tatanan ekonomi dan sosial setempat (Sifriyani *et al.*, 2021). Dengan demikian, kajian ketenagakerjaan pada tingkat kabupaten dan kota menjadi penting untuk menjelaskan hubungan antara indikator pasar kerja, seperti partisipasi angkatan

kerja dan Upah Minimum, dengan pengangguran, termasuk peran pendidikan di dalamnya (Atunnisa' *et al.*, 2024).

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) lazim digunakan sebagai indikator kinerja pasar kerja karena menggambarkan proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Indikator ini merefleksikan adanya potensi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja (Susanto & Pratama, 2021). Dalam perspektif ekonomi tenaga kerja, pengangguran berkaitan dengan proses pencarian kerja, rigiditas upah, serta penyesuaian permintaan tenaga kerja terhadap biaya tenaga kerja. Oleh karena itu, perubahan kebijakan upah maupun dinamika partisipasi angkatan kerja berpotensi memengaruhi TPT melalui mekanisme pasar kerja. Secara empiris, kajian pemodelan TPT di berbagai daerah menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum, partisipasi angkatan kerja, dan pendidikan sering digunakan untuk menjelaskan variasi TPT antarwilayah (Utami, 2018).

Selanjutnya, kajian dengan perspektif spasial memperlihatkan bahwa faktor penentu tingkat pengangguran terbuka memiliki karakter yang berbeda antarwilayah. Pengaruh suatu variabel dapat muncul dengan intensitas yang beragam sesuai dengan kondisi geografis, struktur ekonomi, dan dinamika sosial setempat, sehingga analisis ketenagakerjaan perlu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah secara spesifik (Sifriyani *et al.*, 2021). Kondisi tersebut memperkuat pentingnya penelitian ketenagakerjaan pada lingkup kabupaten dan kota guna memahami keterkaitan indikator pasar kerja dengan ciri tenaga kerja daerah, termasuk tingkat pendidikan sebagai faktor yang berperan dalam pembentukan peluang kerja (Khofifah, 2022).

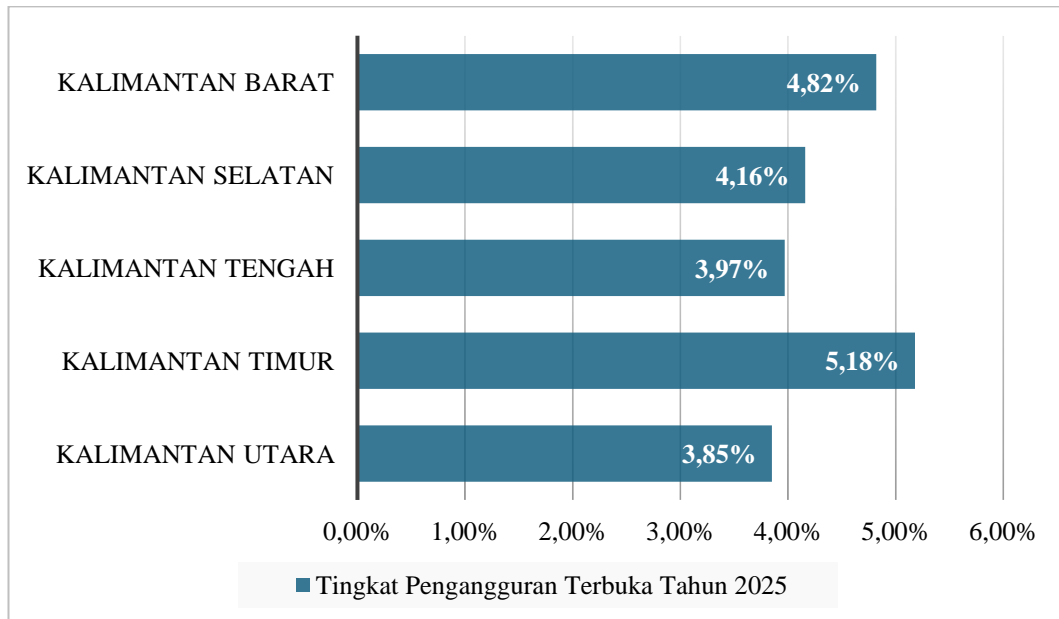
Secara konseptual, TPT dipengaruhi oleh tingginya penawaran dan permintaan tenaga kerja. Sisi penawaran diwakili oleh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang menunjukkan tingkat penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sedangkan sisi permintaan diwakili oleh penyerapan tenaga kerja. Pengangguran dapat meningkat ketika tidak ada penciptaan lapangan kerja yang signifikan untuk menampung perubahan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), sebagaimana dibuktikan oleh bukti empiris regional yang berbeda (Atunnisa' *et al.*, 2024). Oleh karena itu, TPAK kerap dimasukkan sebagai variabel penjelas dalam studi determinan TPT, meskipun arah dan besaran pengaruhnya dapat berbeda antarwilayah (Susanto & Pratama, 2021).

Upah Minimum juga memiliki keterkaitan dengan pengangguran karena berhubungan dengan biaya tenaga kerja dan insentif bekerja. Dalam teori ekonomi tenaga kerja, kenaikan Upah Minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang terserap, namun juga dapat menyebabkan permintaan tenaga kerja tertekan tanpa peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pada kenyataannya, variabel Upah Minimum cenderung masuk dalam analisis pengangguran regional, tetapi korelasi yang ditemukan di sana tidak selalu sama di seluruh wilayah dan masih bergantung pada kekhususan ekonomi lokal (Susanto & Pratama, 2021). Beberapa studi juga menunjukkan bahwa pengaruh Upah Minimum terhadap indikator sosial ekonomi tertentu dapat tidak signifikan, sehingga pengujian empiris kontekstual tetap diperlukan (Nurzakiah & Nurfahmiyati, 2025).

Rata-rata lama sekolah (RLS) sebagai indikator pendidikan mencerminkan peran modal manusia dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja (Sulistiyono *et al.*, 2024). Pendidikan membekali individu dengan keterampilan dan

pengetahuan yang mendukung peningkatan peluang kerja serta memperkuat kesesuaian antara tenaga kerja dan kebutuhan pasar (Salim, 2023). Teori modal manusia memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang membentuk kemampuan adaptasi individu terhadap perubahan permintaan tenaga kerja (Salim, 2023). Temuan empiris menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan dalam menurunkan pengangguran dipengaruhi oleh tingkat pencapaian pendidikan dan daya serap struktur pekerjaan terhadap keterampilan yang tersedia (Sulistiyono *et al.*, 2024).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah karena mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan Masyarakat. Secara empiris, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh akumulasi modal fisik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Ketika pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja, maka pengangguran dapat ditekan sehingga tercipta stabilitas sosial dan ekonom. Namun, tanpa perencanaan yang tepat dan berbasis kondisi lokal, pertumbuhan ekonomi berpotensi menimbulkan ketimpangan dan meningkatkan pengangguran sehingga diperlukan pembangunan yang terintegrasi (Paramita & Christianingrum, 2022).

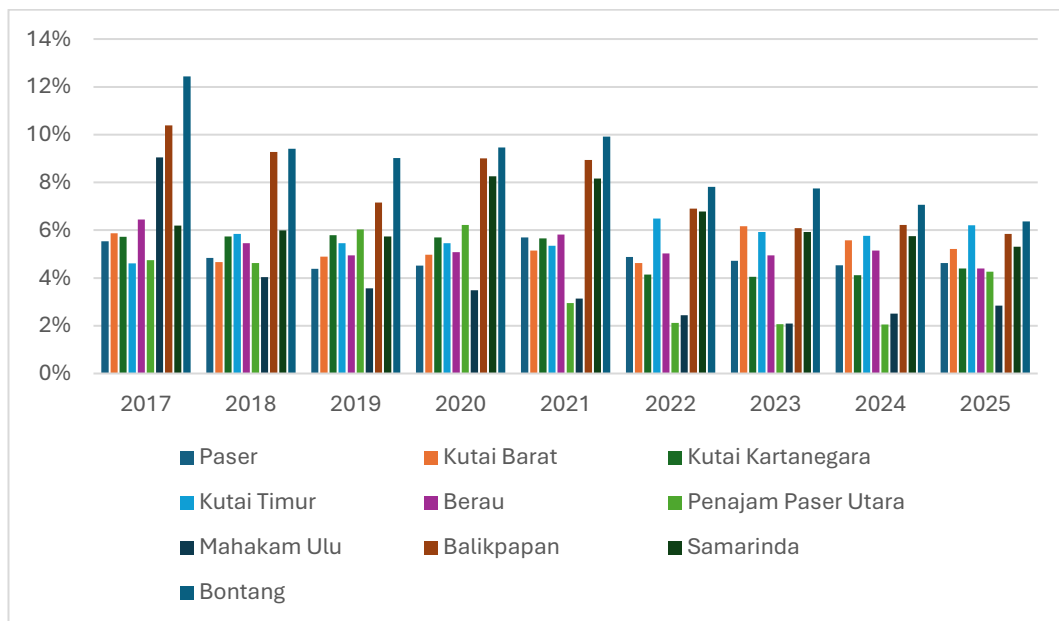
Gambar 1.1. TPT di Pulau Kalimantan Tahun 2025

(Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.1, Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tingkat pengangguran terbuka tertinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Kondisi ini cukup kontras mengingat Kalimantan Timur memiliki potensi ekonomi besar yang ditopang sektor sumber daya alam, industri ekstraktif, serta penempatannya sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun demikian, tantangan ketenagakerjaan masih terlihat, terutama pada sejumlah kabupaten dan kota. Berdasarkan indikator ketenagakerjaan dan sosial ekonomi seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, Upah Minimum, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan ekonomi, tampak adanya ketimpangan antarwilayah yang memengaruhi variasi tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, belum sepenuhnya diikuti oleh penyerapan tenaga kerja yang merata di Provinsi Kalimantan Timur (Sifriyani *et al.*, 2021).

Badan Pusat Statistik menyediakan informasi yang relatif konsisten mengenai indikator ketenagakerjaan, pendidikan, dan ekonomi, termasuk TPT, TPAK, Upah Minimum, RLS, dan Laju PDRB pada level kabupaten dan kota. Data ini dapat digunakan dalam analisis tren antar periode dan perbandingan antar wilayah karena ketersediaannya. Selain itu, pemetaan wilayah berdasarkan faktor pengangguran biasanya diterapkan untuk menentukan wilayah yang membutuhkan prioritas kebijakan, serta digunakan untuk mengonfirmasi fakta bahwa pengangguran adalah masalah yang tidak proporsional (Ibrahim & Marliana, 2025).

Gambar 1.2. TPT Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017–2025



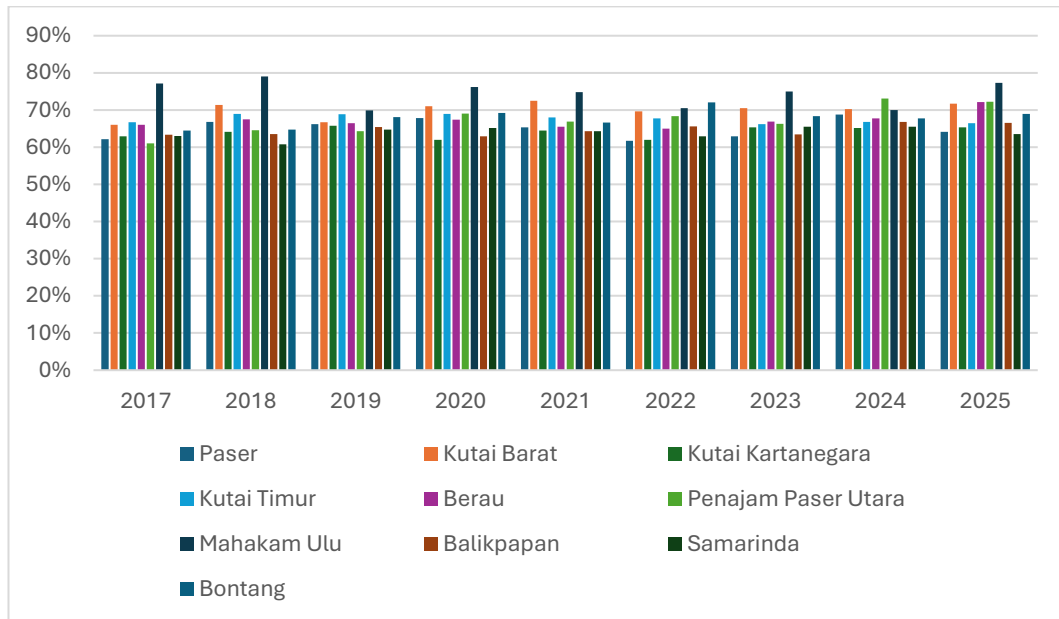
(Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.2., Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2017–2025 menunjukkan dinamika yang bervariasi antarwilayah. Pada tahun 2025, tingkat pengangguran tertinggi tercatat di Kota Bontang sebesar 6,36 persen, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 2,84 persen . Disparitas

ini mengindikasikan bahwa tekanan pasar tenaga kerja tidak terjadi secara merata, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik struktural ekonomi daerah masing-masing. Beberapa wilayah perkotaan seperti Balikpapan dan Samarinda masih menunjukkan tingkat pengangguran relatif tinggi dibandingkan wilayah dengan basis ekonomi yang lebih terbatas. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses penyerapan tenaga kerja di tingkat kabupaten/kota belum sepenuhnya stabil dan masih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi regional. Variasi ini sejalan dengan temuan bahwa determinan TPT bersifat spesifik wilayah sehingga kebijakan seperti Upah Minimum atau Pendidikan dapat menunjukkan korelasi yang berbeda pada tiap daerah (Sifriyani *et al.*, 2021). Oleh karena itu, analisis deskriptif perlu dilanjutkan dengan pengujian empiris agar faktor dominan pengangguran di Kalimantan Timur dapat diidentifikasi secara lebih akurat (Susanto & Pratama, 2021).

TPAK menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik bekerja maupun mencari kerja. Peningkatan TPAK menunjukkan bertambahnya penawaran tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja. Pada kondisi tertentu, peningkatan partisipasi yang tidak diimbangi penciptaan lapangan kerja dapat berkorelasi dengan kenaikan pengangguran terbuka (Atunnisa' *et al.*, 2024). Oleh karena itu, korelasi antara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran Terbuka (TPT) sangat bergantung pada kapasitas ekonomi suatu wilayah untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Gambar 1.3. TPAK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017–2025



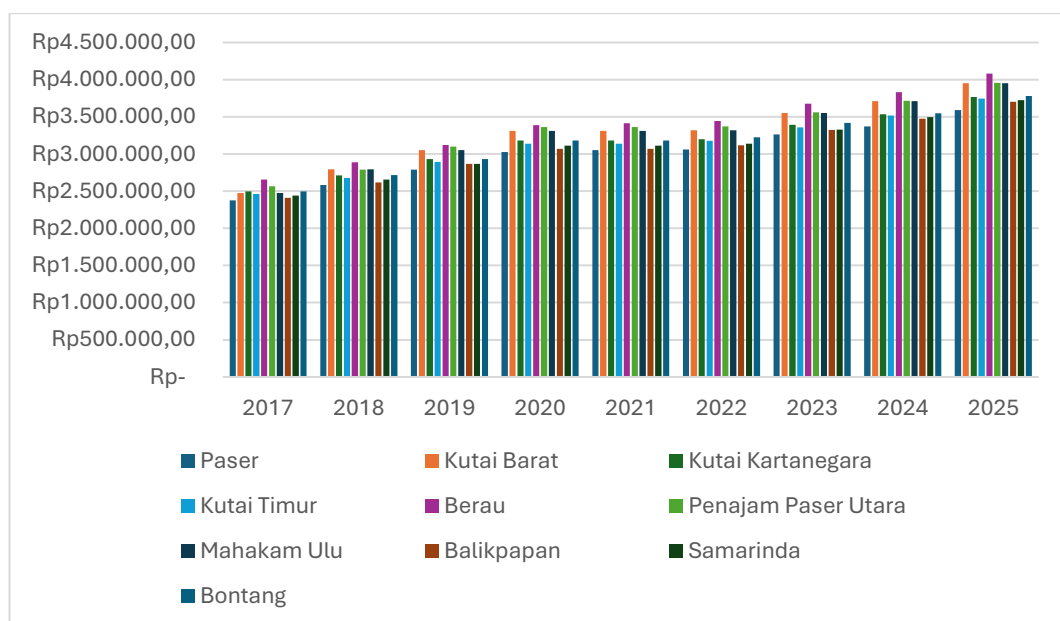
(Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.3., Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2017–2025 menunjukkan variasi yang cukup beragam dengan kisaran yang relatif lebar antar wilayah. Pada tahun 2025, tingkat partisipasi tertinggi tercatat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 77,33 persen, sedangkan yang terendah berada di Kota Samarinda sebesar 63,55 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik pasar kerja dan struktur ekonomi antar daerah. Tingkat partisipasi yang relatif tinggi di beberapa wilayah mencerminkan besarnya proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, sehingga meningkatkan potensi penawaran tenaga kerja. Tingginya partisipasi tersebut dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah, namun juga berpotensi menimbulkan tekanan pada pasar kerja apabila penciptaan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja (Atunnisa' *et al.*, 2024). Sejumlah pemodelan determinan TPT di tingkat provinsi juga mengonfirmasi bahwa TPAK merupakan variabel yang relevan, meskipun

signifikansi dan arah pengaruhnya tetap perlu diuji dalam konteks wilayah tertentu (Susanto & Pratama, 2021).

Upah Minimum adalah instrumen kebijakan yang secara langsung terkait dengan kesejahteraan pekerja dan keputusan yang diambil perusahaan dalam hal perekrutan. Biaya produksi ketika upah meningkat berpotensi mengurangi kuantitas tenaga kerja yang diminta dalam teori permintaan tenaga kerja, terutama ketika produktivitas tidak meningkat atau ketika elastisitas permintaan tenaga kerja tinggi (Zuliasari & Rachmawati, 2021). Namun demikian, dampak peraturan Upah Minimum juga bergantung pada organisasi pasar tenaga kerja dan kekhususan angkatan kerja lokal, sehingga hasilnya tidak bisa sama di semua wilayah (Sifriyani *et al.*, 2021). Oleh karena itu, penelitian berbasis data daerah umumnya memasukkan Upah Minimum sebagai variabel penjelas dalam analisis TPT (Susanto & Pratama, 2021).

Gambar 1.4. Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017–2025

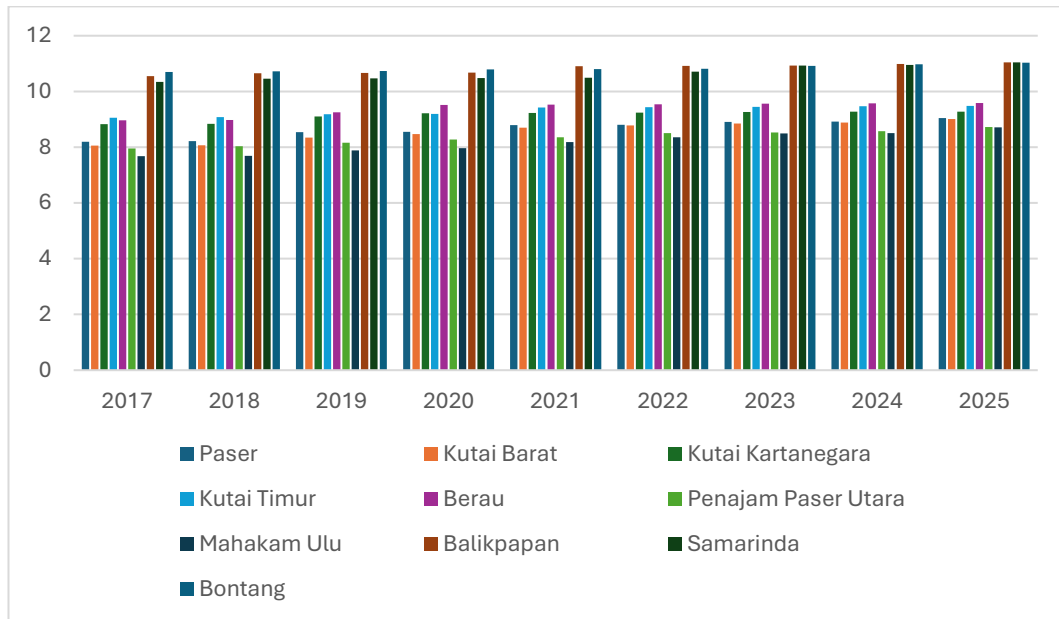


(Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025)

erdasarkan Gambar 1.4., Upah Minimum pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2017–2025 menunjukkan tren meningkat di seluruh wilayah. Pada tahun 2025, upah minimum tertinggi tercatat di Kabupaten Berau sebesar Rp4.081.396, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Paser sebesar Rp3.591.566. Kenaikan ini mencerminkan kebijakan pengupahan yang bertujuan menjaga daya beli pekerja, meskipun terdapat perbedaan antar daerah yang menunjukkan variasi kondisi ekonomi. Dalam konteks pasar kerja, peningkatan upah minimum berpotensi memengaruhi penyerapan tenaga kerja apabila tidak diimbangi dengan produktivitas. Oleh karena itu, implikasi empiris Upah Minimum terhadap tingkat pengangguran perlu diuji dalam kerangka wilayah Kalimantan Timur (Harits & Nurhayati, 2024). Beberapa temuan juga menunjukkan bahwa pengaruh Upah Minimum tidak selalu signifikan, sehingga evaluasi berbasis data menjadi penting (Nurzakiah & Nurfahmiyati, 2025).

Dalam teori modal manusia (Schultz, 1961), menjelaskan pendidikan dianggap sebagai investasi yang meningkatkan produktivitas dan pekerjaan, serta terjadi peningkatan RLS yang kemungkinan akan meningkatkan pencocokan pekerjaan dan mengurangi bahaya pengangguran. Dalam berbagai studi ketenagakerjaan, diasumsikan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam membedakan status pekerjaan dan karakteristik penyerapan tenaga kerja (Armiyana *et al.*, 2024). Namun, kajian determinan TPT di tingkat daerah juga menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan dapat melemah apabila rata-rata lama sekolah masih rendah atau tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Utami, 2018).

Gambar 1.5. RLS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017–2025



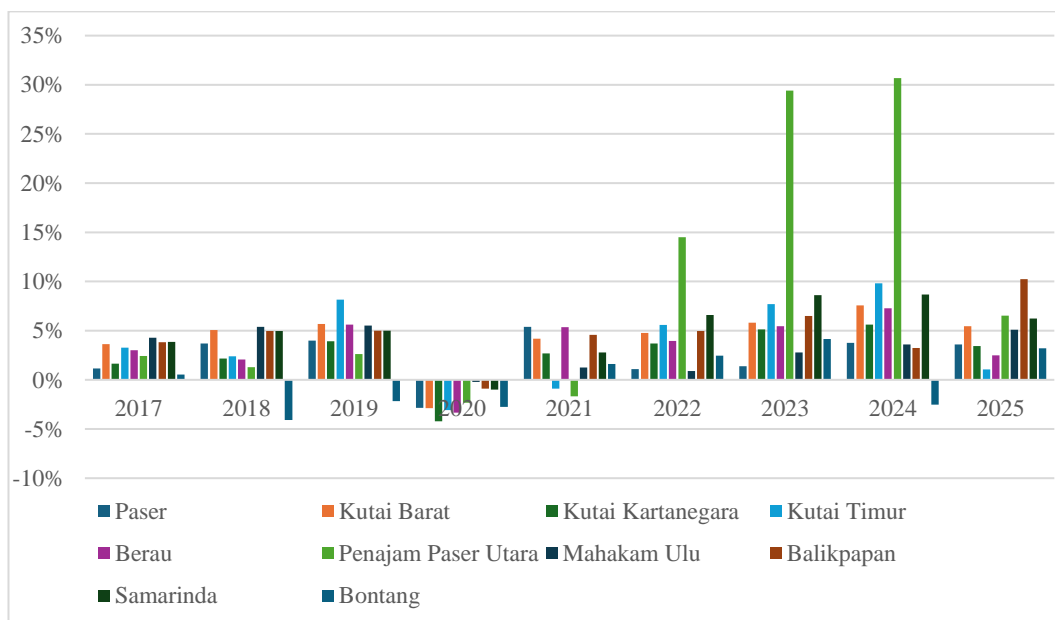
(Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025)

Menurut Gambar 1.5., rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan bertahap dari 9,84 tahun pada 2021 menjadi 10,1 tahun pada 2025 ini memberikan indikasi perbaikan capaian pendidikan masyarakat pada level provinsi. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah yang berada pada kisaran jenjang pendidikan menengah pertama hingga awal menengah atas masih berpotensi membatasi daya saing tenaga kerja apabila kebutuhan pasar kerja mensyaratkan keterampilan yang lebih tinggi (Utami, 2018). Kondisi ini memperlihatkan bahwa kualitas sumber daya manusia tetap menjadi faktor penting dalam menjelaskan dinamika pengangguran terbuka di Kalimantan Timur.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi suatu wilayah yang berimplikasi langsung terhadap penciptaan lapangan kerja. Dalam kerangka teori makroekonomi, pertumbuhan output yang lebih tinggi mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja karena ekspansi

kegiatan produksi di berbagai sektor, sehingga berpotensi menurunkan tingkat pengangguran terbuka (Susanto & Pratama, 2021). Namun, efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah, tingkat produktivitas, serta kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Pertumbuhan yang tidak diikuti oleh perluasan kesempatan kerja atau bersifat padat modal cenderung memberikan dampak yang terbatas terhadap penurunan pengangguran. Oleh karena itu, dalam analisis empiris ketenagakerjaan daerah, pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai variabel penjelas untuk mengidentifikasi sejauh mana ekspansi ekonomi mampu mendorong penyerapan tenaga kerja dan menekan tingkat pengangguran terbuka (Yeimo & Ayuningsasi, 2022).

Gambar 1.6. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017–2025



(Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.6., pertumbuhan ekonomi pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2017–2025 menunjukkan

dinamika yang berfluktuasi antar wilayah. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sebesar 11,04 persen, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 8,71 persen . Variasi ini mencerminkan perbedaan struktur ekonomi dan sumber pertumbuhan di masing-masing daerah, di mana wilayah perkotaan cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan beberapa wilayah berbasis sumber daya. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan dan ekspansi ekonomi belum merata, sehingga berimplikasi pada perbedaan kapasitas dalam menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pertumbuhan dan sektor yang berkembang di masing-masing wilayah.

Beberapa penelitian telah mengkaji determinan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Timur. Tumilaar *et al.*, (2022) menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Kalimantan Timur masih relatif tinggi dan dipengaruhi dinamika kependudukan serta ketenagakerjaan antarwilayah. Hasil regresi data panel periode 2011–2021 menunjukkan jumlah penduduk dan Upah Minimum berpengaruh negatif signifikan, sedangkan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Pengaruh antara tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan hasil yang bervariasi dalam penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila *et al.*, (2022) di Provinsi Jawa Barat menemukan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Tumilaar *et al.*, (2022) menemukan bahwa Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Timur. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Rizki *et al.*, (2025) di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Penelitian Tumilaar *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Timur, yang mengindikasikan adanya mismatch tenaga kerja. Sebaliknya, Johar *et al.*, (2021) di Provinsi Banten menemukan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wilujeng & Prasetyia (2024) di Pulau Jawa menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hasil analisis data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan tingkat pengangguran, yang mengindikasikan bahwa ekspansi aktivitas ekonomi mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja . Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, yang menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum berpotensi meningkatkan pengangguran apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka masih bersifat beragam di berbagai wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan analisis regresi data panel, sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat di wilayah tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur?
3. Bagaimana pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur?
4. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan data panel dengan cakupan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Mahakam Ulu, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Penajam Paser Utara, dengan periode pengamatan selama lima tahun mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel dependen, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Rata Rata Lama Sekolah, dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel independen.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi, khususnya ekonomi ketenagakerjaan dan ekonomi regional, yang berkaitan dengan pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sarana untuk mengimplementasikan teori-teori ekonomi yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam analisis empiris yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi yang lebih terarah. Informasi yang diperoleh dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, mengoptimalkan partisipasi angkatan kerja, menetapkan kebijakan upah minimum, serta mendorong pertumbuhan ekonomi guna menekan tingkat pengangguran terbuka.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa, khususnya terkait

faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka dengan melibatkan variabel ketenagakerjaan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah, periode waktu, serta metode analisis yang lebih luas dan komprehensif.